

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NO 12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA
PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surabaya).**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Politik Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

KRISNA INDRA SASONGKO

NPM. 1341010079

**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
SURABAYA
2018**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016
TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN
LALU LINTAS
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surabaya)**

Oleh:

KRISNA INDRA SASONGKO
NPM.1341010079

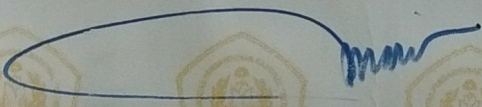
Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi
Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada Tanggal : 18 Mei 2018

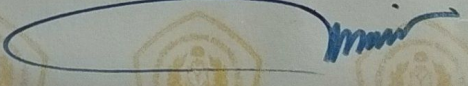
Menyetujui,

PEMBIMBING

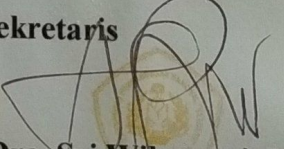
TIM PENGUJI


Dr. Lukman Arif, M.Si
NIP. 19670461994032001

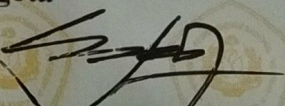
1. Ketua


Dr. Lukman Arif, M.Si
NIP. 19670461994032001

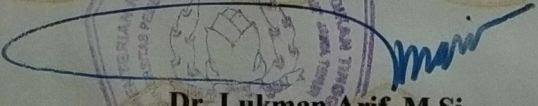
2. Sekretaris


Dra. Sri Wibawani, M.Si
NIP.19670461994032001

3. Anggota


Tukiman, S.Sos, M. Si
NIP.196103231989031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Lukman Arif, M.Si
NIP. 196411021994031001

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA
PELANGGARAN LALU LINTAS
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surabaya)**

Nama Mahasiswa : Krisna Indra Sasongko

NPM : 1341010079

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

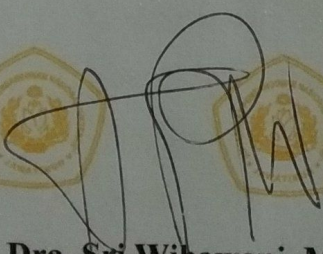
Menyatakan Bahwa Skripsi ini Telah Direvisi Dan Disahkan

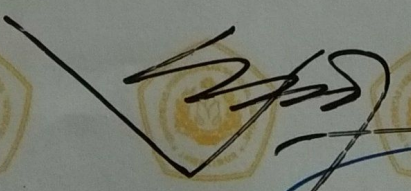
Pada Tanggal : Mei 2018

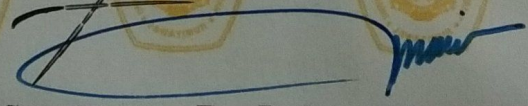
Tim Penguji I

Tim Penguji II

Tim Penguji III


Dra. Sri Wibawani, M.Si
NIP.196411021994031001


Tukiman, S.Sos, M. Si
NIP.196103231989031001


Dr. Lukman Arif, M.Si
NIP.19670461994032001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, berkat, dan anugrah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **Implementasi Kebijakan Peraturan Makamah Agung Republik Indonesia No 12 Tahun 2016 Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surabaya)**”.

Skripsi ini disusun dalam rangkai memenuhi persyaratan kurikulum Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran “ Jawa Timur.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Lukman Arif, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun dalam pelaksanaan penyusunan skripsi ini. Disamping itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Teguh sudarto, MP, Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Dr. Lukman Arif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dr. Ertien Rining N, M. Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Kedua Orang Tua Penulis yang senantiasa mengirngi dengan doa, dukungan dan dorongan semangat.
5. Sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan bantuan dan semangat di dalam pembuatan skripsi ini.
6. Teman-teman Program Studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2013 yang telah membantu penulis baik moril maupun materil.
7. Dan semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulisan menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harap. Akhir kata dengan segala keterbatasan yang penulis miliki semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan khususnya bagi penulis dan bagi fakultas pada umumnya serta para pembaca.

Surabaya, Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR RIVISI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9

2.1. Penelitian Terdahulu.....	9	
2.2. Landasan Teori.....	17	
2.2.1. Kebijakan Publik.....	17	
2.2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik.....	17	
2.2.1.2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	19	
2.1.1.3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pembuatan Kebijakan.....	20	
2.1.1.4. Kerangka Kerja Kebijakan Publik.....	21	
2.1.1.5. Jenis Kebijakan Publik.....	22	
2.1.1.6. Ciri-Ciri Kebijakan Publik.....	23	
2.1.1.7. Tingkat Kebijakan Publik.....	15	
2.1.1.8. Karakteristik Kebijakan Publik.....	16	
2.1.1.9. Aktor-aktor dan Pelaku Pembuat Kebijakan	17	
2.1.2. Implementasi	19	
2.1.2.1. Pengertian	19	Implementasi
2.1.2.2. Pengertian Kebijakan.....	20	Implementasi
2.1.2.3. Model	22	Implementasi Kebijakan
2.1.2.4. Tahap-Tahap Kebijakan.....	32	Implementasi

2.1.2.5.	Faktor-Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan.....	33
2.1.2.6.	Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan.....	35
2.1.3.	Peraturan Mahkamah Agung No 12 Tahun 2016.....	36
2.1.3.1	Isi Peraturan Makamah Agung N0 12 Tahun 2016.....	36
2.1.3.2	Program Pelayanan Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Surabaya	39
2.2.	Kerangka Berfikir.....	41

BAB III METODE

PENELITIAN.....	42
------------------------	-----------

3.1. Jenis

Penelitian.....	42
------------------------	-----------

3.2. Lokasi

Penelitian.....	43
------------------------	-----------

3.3. Fokus	
penelitian.....	
43	
3.4. Sumber	
Data.....	45
3.5. Teknik Pengumpulan	
Data.....	47
3.6. Teknik Analisis	
Data.....	48
3.7. Keabsahan	
Data.....	50
BAB IV HASIL DAN	
PEMBAHASAN.....	54
4.1. Gmbaran Umum Objek	
penelitian.....	54
4.1.1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri	
Surabaya.....	54
4.1.2. Visi dan	
Misi.....	
.....	55
4.1.3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri	
Surabaya.....	56

4.1.4. Tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan.....	56
4.1.5. Rincinan Pegawai Pengadilan Negeri Surabaya.....	60
4.1.6. Deskripsi Peraturan Mahkamah Agung no 12 tahun 2016 di Pengadilan Negeri Surabaya.....	62
4.2. Hasil Penelitian.....	65
4.2.1. Tahapan Sebelum Persidangan.....	64
a.	
4.2.1.1. Proses Pelaksanaan Kebijakan Tahapan Persidangan Tilang Di Pengadilan Negeri Surabaya.....	67
4.2.1.2. Tujuan Proses Pelaksanaan Kebijakan Tahapan Sebelum Persidangan Tilang Di Pengadilan Negeri Surabaya tercapai	70
4.2.1.2.1. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok	70

**4.2.1.2.2. Tingkat perubahan yang terjadi
Tahapan Sebelum Persidangan.....**

74

4.2.2. Tahapan

Persidangan.....

.... 78

4.2.2.1. Proses Pelaksanaan Kebijakan Tahapan

Persidangan Tilang Di Pengadilan Negeri

Surabaya.....81

4.2.2.2. Tujuan Proses Pelaksanaan Kebijakan Tahapan

Persidangan Tilang Di Pengadilan Negeri

Surabaya tercapai..... 86

**4.2.2.2.1. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan
kelompok 86**

**4.2.2.2.2. Tingkat perubahan yang terjadi Tahapan
Persidangan..... 92**

4.2.3. Tahapan Setelah

Persidangan..... 96

**4.2.3.1. Proses Pelaksanaan Kebijakan Tahapan Setelah Persidangan
Tilang Di Pengadilan Negeri Surabaya. 97**

**4.2.3.1.1. Tujuan Proses Pelaksanaan Kebijakan Tahapan Setelah
Persidangan Tilang Kejaksaan Negeri Surabaya
tercapai.....103**

4.2.3.1.2.	Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.....	103
4.2.3.1.3.	Tingkat Perubahan Yang Terjadi Pada Tahapan Setelah Persidangan.	109
4.3.	Pembahasan.....	114
4.3.1.	Proses Pelaksanaan	
4.3.1.1	Proses Pelaksanaan Kebijakan Tahapan Sebelum Persidangan.....	116
4.3.1.2	Proses Pelaksanaan Kebijakan Tahapan Persidangan.....	19
4.3.1.3	Proses Pelaksanaan Kebijakan Tahapan Setelah Persidangan.....	121
4.3.2.	Tujuan Kebijakan Tercapai.....	123
4.3.2.1.	Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok Tahapan Sebelum Persidangan.	124
4.3.2.2.	Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok Tahapan Persidangan	127
4.3.2.3.	Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok Tahapan Setelah Persidangan	130
4.3.2.1.1.	Tingkat perubahan yang terjadi Tahapan Sebelum Persidangan.	1313
4.3.2.1.2.	tingkat Perubahan Yang Terjadi Tahapan Persidangan.	134

4.3.2.1.3. Tingkat Perubahan Yang Terjadi Tahapan Setelah Persidangan

136

BAB V KESIMPULAN DAN

SARAN..... 138

5.1Kesimpulan.....

..... 138

5.2Saran

.....

.. 146

DAFTAR

PUSTAKA.....

147

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1	Model Pendekatan <i>The Policy Implementation Process</i>		
(Menurut	Donald Metter dan Carl Horn		
.....		23	
Gambar 2.2	Model Pendekatan <i>Direct and Indirect on Implementation</i>		
(Menurut George C. Edward			
III).....		26	
Gambar 2.3	Model Pendekatan <i>Implementation as A Political and</i>		
<i>Administrative</i>	<i>Process</i> (Menurut	Merilee	S.
Grindle).....		29	
Gambar 2.4	Model Pendekatan <i>A Framework for Implementation Analysis</i>		
(Menurut Daniel H. Mazmanian dan Paul A.			
Sabatier).....		30	
Gambar 2.5	Model Implementasi Interaktif Thomas R.		
Dye.....		31	
Gambar 3.1	Interaktif		
Model.....		50	
Gambar 4.1	Kantor	Pengadilan	Negeri
Surabaya.....		55	
Gambar 4.2	Surat	Pengantar	dari
Kepolisian.....		65	
Gambar 4.3	Daftar Perkara Tilang		
.....		65	
Gambar 4.4	Dokumen	etak	dan
2017.....		Barang	Bukti
			Tahun
		68	

Gambar 4.5	Formulir	Penetapan
Hakim.....	70	
Gambar 4.6	Berkas	
Persidangan.....	71	
Gambar 4.7	Formulir Penetapan.....	
	73	
Gambar 4.8	Surat Pengantar dari Kepolisian.....	76
Gambar 4.9	Surat Penetapan Sebelu, Persidangan.....	78
Gambar 4.10	Tata Cara Sidang Tilang.....	79
Gambar 4.11	Hakim Yang Ditunjuk Membuka Sidang	84
Gambar 4.12	Web informasi publik terhadap perkara lalu lintas	86
Gambar 4. 13	Laman resmi Pengadilan Negeri Surabaya	88
Gambar 4.14	Petugas mempublikasikan hasil sidang.....	90
Gambar 4.15	Tingkat perubahan	93
Gambar 4.16	Petugas mempublikasikan di laman resmi Pengadilan Negeri Surabaya.....	95
Gambar 4.17	Barang Bukti	96
Gambar 4.18	Kejaksaaan tempat pengambilan barang bukti pelanggar	99
Gambar 4.19	Proses pembayaran denda dan pengambilan barang bukti	101
Gambar 4.20	Data Pelanggar	102
Gambar 4.21	Pengurusan surat tilang kejaksaan Negeri Surabaya	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tingkat Jumlah Penduduk Per Kota di Provinsi Jawa Timur.....	1
Tabel 1.2	Jumlah Kendaraan Bermotor di Surabaya Tahun 2014 Sampai 2016.....	2
Tabel 1.3	Data Pelanggaran Lalu Lintas di Surabaya.....	4
Tabel 4.1	Rincinan Pegawai Pemerintahan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	60
Tabel 4.2	Rincinan pegawai pemerintahan di Pengadilan Negeri Surabaya Berdasarkan pendidikan.....	61
Tabel 4.3	Rincinan pegawai pemerintahan di Pengadilan Negeri Surabaya Berdasarkan Pangkat/Golongan PNS.....	62